ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) *ONLINE* DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

Penggunaan *Information and Communication Technology* atau *ICT* yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk lembaga pemerintahan maupun masyarakat adalah dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih baik. Berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran pembuatan identitas kependudukan sebagai warga Negara Indonesia. KTP *Online* sebagai cara pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelayanan yang lebih tepat cepat dan akurat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengemukakan Lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu analisis kebijakan yaitu, (1) Perumusan Masalah Kebijakan (2) Peramalan Kebijakan (3) Rekomendasi Kebijakan (4) Pemantauan Kebijakan dan (5) Penilaian Kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik Pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan kebijakan KTP *Online* yang bersifat secara *intern* di kantor Desa-desa, hal tersebut misalnya seperti penyimpanan data dengan menjaga integritas dan keamanan data yang masuk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berusaha agar kebijakan KTP *Online* ini menjadi kebijakan yang sangat tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, misalnya dengan mensosialisasikan KTP *Online* ke semua Desa-desa dan mengatasi kendala di lapangan, seperti memperlengkap sarana dan prasarana agar kebijakan KTP *Online* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik.

ABSTRACT

THE POLICY ANALISYS KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) *ONLINE REGULATION AT THE HOME MINISTRY AND VITAL STATISTIC OFFICE OF* PURWAKARTA *REGENCY*

Use of Information and Communication Technology or ICT carried out by the government for both government agencies and the community is able to achieve better governance practices. Various activities undertaken by the government improve public services, improve the efficiency of the implementation of regional autonomy, the government can improve services making registration of population identity as citizens of Indonesia. Online ID cards as a way of Purwakarta district governments in improving service to the community in a more appropriate service quickly and accurately.

The theory used in this study is the theory of public policy analysis put forward by William N. Dunn suggested five factors that influence the success or failure of a policy analysis that is, (1) Formulation of Policy Issues (2) Forecasting Policy (3) Policy Recommendations (4) Monitoring and Policy (5) Assessment Policy.

The research method used is descriptive research method with qualitative approaches. Mechanical determination of informants is using purposive technique. The data collection technique is observation, book study and interview. Data analysis technique used is descriptive qualitative which includes data collection, data display and decision-making and verification.

The results showed that the success of Purwakarta Regency Government in policy implementation Online ID card that is internally in the office of villages, it is such as to maintain the integrity of data storage and security of incoming data. Department of Population and Civil Registration Purwakarta Regency trying to bring the Online ID is a policy that is appropriate and beneficial for society, for example by socializing Online ID cards to all the villages and overcome obstacles in the field, such as completing the infrastructure for policies that do KTP Online by the Purwakarta Regency government can run well.